

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 PENELITIAN TERDAHULU

Peneliti menggunakan dua artikel jurnal penelitian terdahulu, sebagai alat bantu peneliti dalam melakukan penelitian. Peneliti menggunakan penelitian dari Youngmin Yoon (2005) dan Wooyeol Shin (2015).

Penelitian Yoon (2005) berjudul *Examining Journalists' Perceptions and News Coverage of Stem Cell and Cloning Organizations*, menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan dua metode penelitian, yaitu metode survei dan analisis isi. Yoon mengukur penilaian jurnalis terhadap kredibilitas sumber. Para jurnalis menilai sebanyak 30 organisasi, yang meliputi enam program penelitian akademik, lima asosiasi profesional, sembilan kelompok advokasi, lima organisasi perusahaan, dua agen pemerintahan, dua lembaga penelitian nirbala, dan satu anggota kongres. Organisasi-organisasi tersebut digunakan sebagai sumber dalam berita-berita mengenai debat *cloning* atau sel induk di tahun 2002.

Yoon meneliti sebanyak 1.705 artikel yang menyiarkan berita *cloning* atau sel induk dan juga meneliti jurnalis-jurnalis dari kanal medis, sains, dan kesehatan di *Time*, *Newsweek*, dan *US News and World Report* dalam penggunaan sumber.

Terdapat dua teori atau konsep yang digunakan dalam penelitian, yaitu *credibility* dan *news coverage*.

Studi yang dilakukan Yoon bertujuan untuk meneliti jika terdapat hubungan antara kredibilitas dan liputan berita organisasi yang terlibat dalam debat mengenai *cloning* dan/atau sel induk. Terdapat lima hipotesis yang digunakan: (H1) semakin besar kredibilitas sumber suatu organisasi, semakin besar jumlah liputan berita yang diterimanya; (H2) semakin besar kredibilitas sumber suatu organisasi, semakin penting organisasi tersebut digambarkan dalam liputan berita; (H3) semakin besar kredibilitas sumber suatu organisasi, semakin banyak liputan berita regular yang diterimanya; (H4) semakin besar kredibilitas sumber suatu organisasi, semakin banyak berita positif yang diterimanya; dan (H5) berbagai jenis organisasi akan menerima evaluasi kredibilitas sumber yang berbeda dari jurnalis.

Hasil penelitian Yoon menyatakan bahwa H3, H4, dan H5 memang terjadi. H3 membuktikan bahwa kredibilitas sumber dan jurnalis memiliki hubungan positif dan signifikan. Hal ini juga menunjukkan bahwa semakin banyak wartawan menilai organisasi adalah kredibel, maka semakin konsisten juga organisasi menerima liputan. Hal ini juga memungkinkan H4 terjadi. Wartawan yang menilai organisasi sebagai kredibel akan menggambarkan organisasi tersebut positif dalam liputan berita.

Dalam menemukan hasil dari H5, Yoon menggunakan perhitungan menggunakan rumus ANOVA, yaitu analisis statistik yang menguji perbedaan nilai/angka antar kelompok. Dalam tabel yang dipaparkan dalam penelitian,

sumber-sumber organisasi yang berbau bisnis memiliki kredibilitas yang jauh lebih rendah dari skor kredibilitas lembaga organisasi penelitian nirbala, universitas, dan asosiasi profesional. Selain itu, skor kredibilitas kelompok advokasi mendapat skor yang jauh lebih rendah dari skor sumber universitas. Secara keseluruhan, jurnalis dan editor dalam media yang diteliti Yoon menganggap institut penelitian nirbala (dengan *mean* 15,52) sebagai sumber yang paling kredibel, disusul sumber universitas (dengan *mean* 14,92), asosiasi profesional (dengan *mean* 14,41), sumber pemerintah (dengan *mean* 13,84), organisasi advokasi (dengan *mean* 11,52), dan sumber bisnis (dengan *mean* 10,27).

Persamaan penelitian Yoon dengan penelitian peneliti adalah peneliti menggunakan konsep yang digunakan Yoon yaitu kredibilitas sumber. Perbedaan penelitian yang dilakukan Yoon dan yang dilakukan peneliti berasal dari objek penelitian. Yoon mengadakan penelitian mengenai berita berbau sains atau kesehatan, berbeda dengan penelitian ini yang mengenai transparansi sumber dari kanal periksa fakta. Peneliti juga menggunakan metode yang berbeda dengan Yoon. Peneliti menggunakan metode studi kasus dan menggunakan kualitatif sebagai jenis penelitian. Peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan studi dokumen.

Penelitian kedua adalah penelitian Wooyeol Shin (2015) yang berjudul *Being a truth-teller who serves only the citizens: A case study of Newstapa*. Penelitian Yoon mengeksplorasi bagaimana Newstapa, salah satu media berita independen di Korea, dapat menyajikan berita yang transparan dan membangun kepercayaan yang baik pada masyarakat. Berdasarkan penelitian, media Newstapa

diproduksi oleh jurnalis profesional yang dipecat atau diturunkan jabatannya dari media sebelumnya karena tekanan politik (Shin, 2015).

Shin menggunakan metode studi kasus, jenis penelitian kualitatif, dan mengumpulkan data lewat wawancara dengan wartawan Newstapa. Shin juga mengumpulkan data lewat analisis dokumen dari teks berita yang diproduksi oleh Newstapa.

Shin menyusun tiga pertanyaan penelitian dari tiga konsep. Dua konsep tersebut adalah *professional logic of control* dan *the emergence of participatory logic and journalists' struggle in the digital area*. Melalui dua konsep tersebut, Shin menyusun tiga pertanyaan penelitian: (1) seperti apa norma-norma jurnalistik tradisional yang dimiliki oleh jurnalis profesional yang diasingkan/dipecat/diturunkan jabatannya?; (2) bagaimana mereka merangkul norma-norma baru dari *participatory logic*, terutama pada norma transparansi?; (3) apakah batasan informasi berita di Newstapa mengarah pada ketegangan *professional-participatory* dalam jurnalisme?

Hasil menunjukkan bahwa jurnalis profesional di Newstapa menerapkan norma “*truth-telling*”, baik dalam konten berita atau praktik jurnalismenya. Tidak hanya itu, norma keadilan dalam berita juga berlaku bagi jurnalis di sana. Seperti contohnya pada berita Newstapa pada 14 Maret 2013, mengenai masalah “Four Major Rivers Project”. Newstapa menyelidiki kerusakan lingkungan yang disebabkan karena proyek tersebut. Karena itu, Newstapa memandang pemerintahan Presiden Lee Myung Bak adalah orang yang bertanggung jawab atas

kerusakan lingkungan yang terjadi. Pada berita tersebut, Newstapa berkesempatan untuk mewawancarai Presiden Lee Myung Bak terkait masalah yang terjadi. Namun, setelah bertemu dengan Lee dan mengajukan pertanyaan, jurnalis Newstapa gagal mendapatkan jawaban karena sudah ditarik oleh para ajudan dari Presiden Lee saat itu. Peristiwa ini juga menjawab bahwa jurnalis Newstapa menggunakan norma transparansi dalam memperoleh data, sebagai jalan mereka untuk mengejar fakta dan kebenaran. Selanjutnya, Newstapa menggabungkan jurnalisme *professional* dan jurnalisme *participatory* untuk membatasi informasi berita. Batas-batas konten Newstapa dinegosiasikan dengan masyarakat, namun pada saat yang sama diperbesar juga untuk para jurnalis profesional yang bekerja di organisasi berita yang pro pemerintah. Alasannya untuk menimbulkan rasa percaya antara Newstapa dan warga negara, yang dibentuk dengan tujuan memberitahu kebenaran dan transparansi dalam mencari berita.

Persamaan penelitian yang dilakukan Shin dengan penelitian ini adalah membahas mengenai transparansi suatu media, menggunakan metode, dan jenis penelitian yang sama. Berbeda dengan penelitian Shin, peneliti meneliti 'Hoaks atau Fakta' dari Kompas.com. Yang membuat penelitian peneliti baru adalah karena peneliti meneliti kanal cek fakta dalam menerapkan transparansi sumber. Peneliti juga akan menggunakan teknik pengumpulan data lewat observasi dalam 'Hoaks atau Fakta' di Kompas.com.

Berdasarkan rincian yang peneliti paparkan di atas mengenai dua penelitian sebelumnya, kelebihan dari penelitian peneliti dapat dilihat dari aspek topik penelitian dan kegunaan penelitian. Berdasarkan riset mandiri dari peneliti, belum

ada penelitian di Indonesia yang membahas mengenai transparansi sumber di media yang mempunyai kanal cek fakta. Peneliti juga mengambil Kompas.com, yang telah memenuhi hampir seluruh prinsip International Fact-Checking Network. Mengetahui bahwa Kompas.com belum memenuhi prinsip transparansi sumber, peneliti memutuskan untuk meneliti permasalahan tersebut.

Selain mengenai topik, penelitian ini juga memiliki kelebihan dalam fungsi kegunaannya. Mengetahui bahwa untuk memerangi berita palsu, jurnalis harus terbuka/transparan terhadap hasil temuannya, khususnya transparan pada sumber (Posetti, 2019, p. 77), penelitian ini dapat memberikan kegunaan akademis dalam mengajarkan masyarakat yang akan berkecimpung dalam dunia jurnalistik untuk menjadi jurnalis yang transparan. Berdasarkan hasil penelitian dari Wooyeol Shin (2015), jurnalis yang transparan terhadap temuannya, dapat memperoleh kepercayaan dari khalayak.

Selain dalam ilmu jurnalistik, penelitian juga bisa memberikan informasi bagaimana sebuah media jurnalistik menerapkan transparansi sumber dalam melakukan praktik jurnalistik setiap harinya. Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat untuk Kompas.com, agar bisa memenuhi prinsip transparansi sumber dari IFCN, sehingga Kompas.com bisa menjadi media pertama di Indonesia yang bisa memenuhi seluruh prinsip IFCN.

Berikut merupakan penjelasan dalam format tabel mengenai penelitian terdahulu yang peneliti gunakan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

TOPIK, PENELITI, DAN TAHUN	METODE	PERTANYAAN PENELITIAN	TEORI DAN KONSEP	HASIL
<p>Examining Journalists' Perceptions and News Coverage of Stem Cell and Cloning Organizations</p> <p>Oleh: Youngmin Yoon</p> <p>Tahun: 2005</p> <p>Bentuk: Artikel Jurnal dari <i>Journalism & Mass Communication Quarterly</i>, Vol. 82, No. 2</p>	<p>Jenis: Kuantitatif</p> <p>Metode: Survei dan Analisis Isi</p> <p>Meneliti jurnalis-jurnalis dari kanal medis, sains, dan kesehatan di <i>Time</i>, <i>Newsweek</i>, dan <i>US News and World Report</i> dalam penggunaan sumber berita <i>cloning</i> dan/atau sel induk.</p> <p>Penggunaan sumber dinilai dari penggunaan sumber 30 organisasi (enam program penelitian akademik, lima asosiasi profesional, sembilan kelompok advokasi, lima</p>	<p>Hipotesis: (H1) semakin besar kredibilitas sumber suatu organisasi, semakin besar jumlah liputan berita yang diterimanya; (H2) semakin besar kredibilitas sumber suatu organisasi, semakin penting organisasi tersebut digambarkan dalam liputan berita; (H3) semakin besar kredibilitas sumber suatu organisasi, semakin banyak liputan berita regular yang diterimanya; (H4) semakin besar kredibilitas sumber suatu organisasi, semakin banyak berita positif yang diterimanya; dan (H5) berbagai jenis organisasi akan menerima evaluasi kredibilitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Credibility</i> - <i>News Coverage</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - H3, H4, dan H5 adalah benar. - Sumber-sumber organisasi yang berbau bisnis memiliki kredibilitas yang jauh lebih rendah dari skor kredibilitas lembaga organisasi penelitian nirbala, universitas, dan asosiasi profesional. - Skor kredibilitas kelompok advokasi mendapat skor yang jauh lebih rendah dari skor sumber universitas. - Rata-rata penilaian jurnalis pada organisasi: institut penelitian nirbala (dengan <i>mean</i> 15,52) sebagai sumber yang paling kredibel, diikuti oleh sumber universitas

	<p>organisasi perusahaan, dua agen pemerintahan, dua lembaga penelitian nirbala, dan satu anggota kongres).</p> <p>Analisis isi 1.705 artikel yang menyiarkan berita <i>cloning</i> atau sel induk.</p>	<p>sumber yang berbeda dari jurnalis.</p>		<p>(dengan <i>mean</i> 14,92), asosiasi profesional (dengan <i>mean</i> 14,41), sumber pemerintah (dengan <i>mean</i> 13,84), organisasi advokasi (dengan <i>mean</i> 11,52), dan sumber bisnis (dengan <i>mean</i> 10,27).</p>
<p>Being a truth-teller who serves only the citizens: A case study of Newstapa</p> <p>Oleh: Wooyeol Shin</p> <p>Tahun: 2015</p> <p>Bentuk: Artikel Jurnal dari <i>Journalism</i>, Vol. 16(5)</p>	<p>Studi kasus dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara wartawan Newstapa dan analisis dokumen berupa berita dari Newstapa.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seperti apa norma-norma jurnalistik tradisional yang dimiliki oleh jurnalis profesional Newstapa yang pernah diasingkan, dipecat, atau diturunkan jabatannya? 2. Bagaimana mereka merangkul norma-norma baru dari <i>participatory logic</i>, terutama pada norma transparansi? 3. Apakah batasan informasi di Newstapa mengarah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Professional logic of control 2. The emergence of participatory logic and journalists' struggle in the digital area 	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Truth-telling" dan norma keadilan (contohnya dalam berita masalah "Four Rivers Project") 2. Transparansi digunakan untuk mencari kebenaran, fakta, dan keadilan. 3. Newstapa menggabungkan <i>professional-participatory</i> untuk membatasi informasi berita. Hal ini dilakukan untuk membangun kepercayaan antara

		pada ketegangan <i>professional-participatory</i> dalam jurnalisme?		Newstapa dan masyarakat, lewat kebenaran dan transparansi.
--	--	---	--	--

2.2 Konsep

2.2.1 Kekacauan Informasi: Misinformasi dan Disinformasi

Era digital memudahkan penyebaran informasi. Namun hal ini juga menjadi tantangan baru bagi jurnalisme, karena harus melawan berita-berita hoaks. Hal ini disebut dengan istilah “kekacauan informasi” (Posetti, 2019, p. 66). Posetti menjelaskan bahwa “kekacauan informasi” berdampak pada tiga hal, yaitu (1) runtuhnya model bisnis tradisional; (2) transformasi digital ruang redaksi dan cara bercerita; dan (3) viralitas.

Dalam “runtuhnya model bisnis tradisional”, kekacauan informasi bisa memberikan dampak menipisnya sumber daya ruang redaksi, baik dari staf maupun anggaran; tekanan tenggat waktu dalam suplai konten yang didesak dalam redaksi; lebih sedikit waktu dan sumber daya untuk fungsi pengecekan dan keseimbangan (seperti pengecekan fakta reporter dan penyuntingan); terlalu mengandalkan “*native advertising*” (tidak disebutkan sebagai iklan, namun menguntungkan); dan judul “*clickbait*” yang berisiko mengurangi kepercayaan khalayak pada media berita (Posetti, 2019, p. 68).

Dalam “transformasi digital ruang redaksi dan cara bercerita”, kekacauan informasi memberikan dampak konvergensi media yang menyebabkan jurnalis semakin dituntut untuk memproduksi berita secara

gawai atau cetak; era digital yang selalu “sekarang” meningkatkan risiko terjadinya kesalahan dalam berita; praktik ”*clickbait*” yang bisa memudarkan kepercayaan khalayak pada jurnalisme profesional; dan mengejar viralitas dengan mengorbankan kualitas dan akurasi berita (Posetti, 2019, pp. 68-70).

Dalam “viralitas”, terdapat tiga cara disinformasi tersebar dengan cepat, yaitu (1) kebangkitan khalayak sebagai produsen dari konten; (2) kedatangan media sosial yang memengaruhi praktik, identitas profesional jurnalis (termasuk dalam memverifikasi berita), dan distribusi konten; dan (3) kejayaan media sosial yang memungkinkan penyebaran disinformasi secara viral (Posetti, 2019, pp. 70-74).

Kekacauan informasi tergolong menjadi tiga kategori, yaitu misinformasi, disinformasi, dan mal-informasi. Terdapat tiga elemen dalam “Kekacauan Informasi” (Wardle & Derakhshan, 2019, p. 59):

1. Agen: oleh siapa, apa yang memotivasi mereka, dan kepada siapa informasi disampaikan.
2. Pesan: jenis pesan dapat bertahan dalam kurun waktu berapa lama, apakah menyesatkan/memanipulasi/rekaan, tujuan pesan.
3. Interpreter: tindakan dari orang yang dituju.

Dalam kekacauan informasi berbentuk berita palsu, sebagian besar menggabungkan kategori misinformasi dan disinformasi (Wardle &

Derakhshan, 2019, p. 53). Misinformasi merupakan “informasi salah yang disebarkan oleh orang yang mempercayainya sebagai hal yang benar” dan disinformasi merupakan “informasi salah yang disebarkan oleh orang yang tahu bahwa informasi itu salah” (para. 2). Secara singkat, misinformasi disebarkan oleh seseorang tanpa mengetahui apakah informasi tersebut benar atau tidak dan disinformasi disebarkan oleh orang yang sudah jelas mengetahui bahwa informasi tersebut adalah hoaks namun tetap menyebarkannya.

Misinformasi dapat menjauhkan khalayak memperoleh informasi yang sebenarnya (Hameleers & Meer, 2019, p. 3). Penyebaran misinformasi yang tidak terkendali dapat mengancam jurnalisme Ancaman dapat berbentuk: (1) informasi yang tidak akurat tersebar secara bersamaan dengan informasi faktual; dan (2) profesi jurnalisme dapat diserang oleh tuduhan menyebarkan berita palsu (Balod & Hameleers, 2019, p. 3).

Disinformasi dapat didefinisikan sebagai penyebaran informasi palsu yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu. Disinformasi dapat menimbulkan kebingungan, ketidakpercayaan, atau paranoia di antara masyarakat (Balod & Hameleers, 2019, p. 2).

Ada pula tujuh jenis disinformasi dan misinformasi (Wardle & Derakhshan, 2019, p. 62):

1. Satire atau parodi: tidak bertujuan menyebabkan kerugian, namun berpotensi menipu.

2. Konten yang menyesatkan: membingkai sebuah isu atau seseorang secara menyesatkan.
3. Konten tiruan: meniru sumber-sumber asli.
4. Konten rekaan: konten yang 100% palsu dan dirancang untuk menipu dan menyebabkan kerugian.
5. Hubungan yang salah: ketika judul, visual, atau keterangan dari informasi tidak mendukung konten.
6. Konteks yang salah: ketika konten asli dibagikan dengan informasi atau konteks yang salah.
7. Konten yang dimanipulasi: ketika informasi atau gambar asli dimanipulasi untuk menipu.

Dalam mendorong jurnalisme melawan berita palsu, Charlie Beckett dalam Posetti mengatakan bahwa jurnalis harus: (1) mudah diakses dan hadir di semua platform; (2) membantu khalayak menemukan konten yang bagus; (3) menggunakan bahasa dan gaya tulisan yang kreatif dan sesuai dengan kebiasaan khalayak; (4) berita yang disebarkan memberikan nilai, wawasan, dan konteks; (5) memberitakan kebenaran dan memeriksa fakta, keseimbangan, dan akurasi; (6) menunjukkan empati, keberagaman, dan bersikap konstruktif; (7) transparansi dengan menunjukkan sumber, akuntabel, dan terbuka pada kritik (Posetti, 2019, p. 77).

2.2.2 *Fact Checking* (Periksa Fakta)

Pada pemilihan Presiden AS pada tahun 1988, muncul “Adwatches”, segmen berita televisi yang mengeksplorasi keakuratan iklan kandidat. Segmen ini dikenal sebagai pemeriksa fakta pertama di dunia. Selanjutnya, pada awal tahun 2000, internet memudahkan beberapa organisasi independen untuk menyediakan informasi korektif mengenai klaim politik yang palsu (Young, Jamieson, Poulsen, & Goldring, 2017, pp. 50-51). The Washington Post Fact Checker muncul pada tahun 2007. Akhirnya, sejak tahun 2012, organisasi pemeriksa fakta mulai muncul di puluhan negara dan membantu mengurangi hoaks. Bahkan beberapa organisasi pemeriksa fakta tersebut merupakan satu bagian dari dunia jurnalistik. Kini, mereka tergabung dalam satu jaringan yang dibentuk oleh Poynter Institute. Jaringan tersebut bernama International Fact-Checking Network (Fact-checking organizations around the globe embrace code of principles, 2016).

Fact checking atau periksa fakta hadir untuk menganalisis suatu informasi, apakah palsu atau tidak. Efek dari misinformasi dan disinformasi memicu pemeriksa fakta untuk mengubah persepsi dari informasi (Hameleers & Meer, 2019, p. 5).

Periksa fakta memeriksa satu/beberapa *statement*, pelaporan, atau cerita tertentu yang dihasilkannya. *Statement* akan dianalisis oleh pemeriksa fakta untuk dilihat apakah benar atau tidak (Graves, 2016, p. 24).

Menurut Lucas Graves, seorang pemeriksa fakta profesional harus menolak argumen berupa komentar, opini, atau kritik. Mereka menganut norma objektivitas dan menjadikannya pusat bagi proses periksa fakta itu sendiri (Graves, 2016, p. 27).

Periksa fakta bertugas untuk menganalisis klaim-klaim atau berita yang diduga sebagai berita palsu atau hoaks. Dalam proses menganalisa klaim tersebut, pemeriksa fakta harus bergantung pada informasi dari para ahli, akademisi, atau lembaga pemerintahan. Hasilnya berupa kesimpulan mengenai kebenaran dari klaim tersebut (Mantzarlis, 2019, p. 100).

Menurut buku UNESCO yang ditulis oleh Ireton dan Posetti, cek fakta terdiri dari tiga fase (Ireton & Posetti, 2018, p. 89):

1. Menemukan klaim yang dapat diperiksa fakta dengan menilai melalui catatan legislatif, media daring, dan media sosial.
2. Menemukan fakta yang tersedia untuk bukti klaim tersebut.
3. Memperbaiki dan mengevaluasi bukti untuk mengungkap kebenaran.

Sebelum melakukan periksa fakta, ketahuilah keterbatasan dan hambatan periksa fakta terlebih dahulu. Mantzarlis mendefinisikan tiga hambatan yang menghalangi periksa fakta: (1) bias konfirmasi, (2) penalaran termotivasi, dan (3) heuristik ketersediaan (Mantzarlis, 2019, pp. 91-92).

Bias konfirmasi atau *confirmation bias* terjadi karena kecenderungan untuk memproses informasi dengan keyakinan atau prasangka yang konsisten. Hal ini mengakibatkan individu mengabaikan informasi yang tidak konsisten. Orang-orang cenderung memproses informasi untuk mendukung keyakinannya sendiri ketika masalah itu sangat penting atau relevan dengan dirinya (Mantzarlis, 2019, p. 91).

Penalaran termotivasi atau *motivated reasoning* mengacu pada kecenderungan individu yang tidak sadar untuk menyesuaikan pemrosesan informasi dengan kesimpulan yang sesuai. Jika seorang individu melihat sesuatu atau seseorang adalah benar, dia akan selalu terpaku pada hal tersebut, tanpa menyadari apakah sesuatu atau seseorang itu sebenarnya benar atau salah (Mantzarlis, 2019, p. 92).

Heuristik ketersediaan atau *availability heuristic* dinilai berdasarkan jumlah kejadian yang mudah diingat. Hal ini membuat individu melihat klaim yang salah sebagai klaim yang benar, karena dapat mengingatnya dengan mudah (Mantzarlis, 2019, p. 92).

Untuk melawan berita palsu atau hoaks, suatu jaringan bernama International Fact Checking Network (IFCN) muncul sebagai unit yang dibentuk oleh Poynter Institute dan didedikasikan untuk menyatukan pemeriksa fakta (The International Fact-Checking Network, n.d.). IFCN dibentuk pada September 2015, dan masih aktif mengumpulkan dan menyatukan organisasi pemeriksa fakta dari seluruh dunia. IFCN membuat

lima komitmen yang harus dilakukan seorang pemeriksa fakta. Lima komitmen tersebut adalah (The commitments of the code of principles, n.d.):

1. *A commitment to Nonpartisanship and Fairness*

Suatu organisasi cek fakta tidak berfokus pada satu sisi saja. Organisasi cek fakta mengikuti proses yang sama untuk setiap fakta yang diperoleh dengan memeriksa dan membiarkan bukti memberikan kesimpulan. Organisasi cek fakta juga tidak memihak dan adil dalam memeriksa fakta.

2. *A commitment to Transparency of Sources*

Organisasi pemeriksa fakta harus transparansi dan terbuka terhadap hasil temuannya, kecuali dalam kasus yang dapat mengancam keamanan pribadi sumber.

3. *A commitment to Transparency of Funding & Organization*

Organisasi pemeriksa fakta transparan atau terbuka jika mereka menerima dana dari organisasi lain, untuk memastikan bahwa yang memberikan dana tidak memiliki pengaruh atas kesimpulan data. Organisasi pemeriksa data juga merinci latar belakang dari struktur organisasi tersebut.

4. *A commitment to Transparency of Methodology*

Organisasi pemeriksa data menjelaskan metodologi yang digunakan untuk memilih, meneliti, menulis, mengedit, menerbitkan, dan memperbaiki pemeriksaan faktanya.

5. *A commitment to an Open & Honest Corrections Policy*

Organisasi pemeriksa fakta terbuka dan jujur terhadap koreksi dan memastikan pembaca melihat versi yang diperbaiki, sesuai dengan kebijakan koreksi.

2.2.3 Transparansi Sumber: Visibilitas dan Kredibilitas Sumber

Dalam mendukung praktik jurnalisme dalam melawan berita palsu dan hoaks, jurnalis harus menerapkan transparansi. Transparansi dalam hal ini dapat berupa transparansi sumber, akuntabel, dan terbuka terhadap kritik (Posetti, 2019, p. 77). Begitu pula dalam IFCN yang mengharuskan para organisasi/media pemeriksa fakta untuk transparan terhadap hasil temuannya.

Adapun lima kode prinsip tersebut yaitu, (1) Komitmen terhadap Nonpartisan dan Keadilan, (2) Komitmen terhadap Transparansi Sumber, (3) Komitmen terhadap Transparansi Pendanaan dan Organisasi, (4) Komitmen terhadap Transparansi Metodologi, dan (5) Komitmen terhadap Kebijakan Koreksi Terbuka dan Jujur (The commitments of the code of principles, n.d.).

Transparency of Sources atau transparansi sumber merupakan satu dari lima prinsip periksa fakta versi IFCN. Dikutip dari IFCN, arti *Transparency of Sources* atau transparansi sumber yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia (The commitments of the code of principles, n.d.):

“Penanda tangan ingin agar pembacanya dapat memverifikasi temuan itu sendiri. Penanda tangan menyediakan semua sumber secara cukup rinci sehingga pembaca dapat mereplikasi pekerjaan mereka, kecuali dalam kasus-kasus di mana keamanan pribadi sumber dapat dikompromikan. Dalam kasus seperti itu, penandatanganan memberikan informasi sedetail mungkin.” (The commitments of the code of principles, n.d.)

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa transparansi sumber adalah di mana sebuah organisasi periksa fakta ingin khalayaknya untuk memverifikasi ulang temuannya. Organisasi pemeriksa fakta harus menyediakan sumber-sumber dengan lengkap dan rinci agar khalayak dapat memeriksa kembali/mereplikasi pekerjaannya. Namun, jika ada informasi yang dapat mengganggu keamanan narasumber, maka organisasi periksa fakta berhak untuk tidak menuliskan sumber. Secara garis besar, transparansi sumber mengharuskan pemeriksa fakta untuk menunjukkan bukti, sumber, atau data yang mereka temukan, dan mendeskripsikannya pada isi berita.

IFCN mendefinisikan bahwa untuk memenuhi prinsip transparansi sumber media periksa fakta:

“Dalam laporan pemohon, sumber-sumber utama selalu direferensikan dan / atau ditautkan dengan jelas sehingga pembaca, pemirsa, atau pendengar dapat dengan mudah memahami dan mereplikasi pengecekan fakta jika mereka mau. Sumber yang digunakan merupakan sumber yang berkualitas tertinggi dan adalah ahli yang telah diperiksa, diteliti, dan bebas dari konflik kepentingan. Selain itu, pemohon telah berbagi deskripsi yang

menyakinkan tentang kebijakan penggunaan sumbernya.” (What does it take to be a signatory?, n.d.).

Kutipan di atas menjelaskan bahwa pemeriksa fakta harus menyediakan sumber yang terlihat, mudah diakses, dan merupakan sumber kredibel yang memiliki bukti kuat. Selain itu, pemeriksa fakta juga harus berbagi deskripsi tentang kebijakannya dalam penyebutan sumber. Hal ini dimaksudkan untuk membuat khalayak mengerti dan dapat mereplikasi hasil temuan pemeriksa fakta (The commitments of the code of principles, n.d.).

Melanjutkan dari kutipan sebelumnya, IFCN menjelaskan bahwa “...sumber-sumber utama selalu direferensikan dan / atau ditautkan dengan jelas...”, yang berarti bahwa sumber harus terlihat dan mudah diakses. Peneliti menggunakan konsep visibilitas dari Michener dan Bersch (2013) yang memiliki arti “terlihat dan mudah diakses” (p. 237). Visibilitas digambarkan sebagai sejauh mana informasi itu lengkap dan ‘dapat ditemukan’. Visibilitas informasi adalah kondisi yang diperlukan dalam transparansi. Agar ‘terlihat’, informasi harus: (1) cukup lengkap dan (2) dapat ditemukan dengan mudah. Transparansi adalah mengenai informasi, dan jika informasi tidak ‘terlihat’, informasi akan kehilangan relevansinya (Michener & Bersch, 2013, p. 238).

Untuk membuat informasi itu visibilitas, informasi harus memiliki tingkatan kelengkapan yang tinggi. Jika khalayak tidak dapat melihat gambaran informasi yang lengkap, maka visibilitas dalam informasi buruk. Selain memiliki tingkat kelengkapan informasi yang tinggi, informasi juga

harus bisa ditemukan atau diakses dengan mudah. Hal ini untuk memudahkan khalayak mengakses kembali sumber informasi (para. 3 & 4).

Selain terlihat dan mudah diakses, penggunaan sumber yang digunakan juga harus berasal dari sumber yang kredibel. Hal ini disampaikan dalam kutipan “Sumber yang digunakan merupakan sumber yang berkualitas tertinggi dan adalah ahli yang telah diperiksa, diteliti, dan bebas dari konflik kepentingan.” (What does it take to be a signatory?, n.d.).

Peneliti menggunakan konsep *source credibility* atau kredibilitas sumber dari Yoon (2005). Yoon menjelaskan bahwa kredibilitas sumber adalah cara pandang jurnalis pada suatu sumber yang dinilai kredibel atau tidak (p. 281). Bahkan, jurnalis menyebutkan bahwa kredibilitas adalah salah satu pengaruh terbesar dalam penggunaan sumber (para. 2). Dengan penilaian jurnalis terhadap sumber, hal ini memengaruhi penggunaan sumber dalam berita (p. 282, para. 2).

Meyer dalam Yoon menjabarkan lima item indeks untuk mengukur kredibilitas. Lima item tersebut adalah akurasi, keadilan, kepercayaan, bias, dan kelengkapan. Lima item ini telah terbukti memiliki keterkaitan kuat dan valid dalam mengukur kredibilitas (p. 283).

2.3 Alur Penelitian

Penanggulangan hoaks di masyarakat dilakukan dengan cek fakta (*fact checking*). Poynter Institute membentuk jaringan bernama International Fact-Checking Network (IFCN) untuk menggabungkan organisasi atau media periksa

fakta dalam satu jaringan. Salah satu media daring Indonesia yaitu Kompas.com telah diverifikasi IFCN sebagai media periksa fakta. Menurut IFCN, Kompas.com telah memenuhi seluruh prinsip IFCN kecuali satu prinsip yaitu *transparency of sources* atau transparansi sumber.

Dari fenomena tersebut, peneliti merumuskan permasalahan bagaimana penerapan transparansi sumber di ‘Hoaks atau Fakta’ Kompas.com, dengan merumuskan masalah: Bagaimana penerapan Transparansi Sumber di ‘Hoaks atau Fakta’ Kompas.com?

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua artikel jurnal internasional sebagai penelitian terdahulu dan menggunakan konsep transparansi sumber dari IFCN. Dalam IFCN, *transparency of sources* atau transparansi sumber mengharuskan sumber harus terlihat, mudah diakses, dan merupakan sumber yang kredibel.

Dalam aspek “terlihat dan mudah diakses”, peneliti menggunakan konsep visibilitas dari penelitian Michener dan Bersch (2013). Dalam aspek sumber kredibel, peneliti menggunakan konsep kredibilitas sumber dari penelitian Yoon (2005).

Dengan data yang dikumpulkan, peneliti akan menganalisis, menarik kesimpulan dan saran dari hasil analisis, hingga diperoleh hasil penerapan transparansi sumber di ‘Hoaks atau Fakta’ Kompas.com.

Berikut merupakan alur penelitian atau kerangka pemikiran peneliti yang dibentuk dalam format bagan.

Bagan 2.1 Alur Penelitian

